

EFEKTIVITAS PROGRAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS DIGITAL

Dian Mardiaty Sari¹⁾, Upi Niarti²⁾

¹Universitas Dehasen Bengkulu-Dian_Kicky@yahoo.co.id

²Politeknik Raflesia-upiniarti@gmail.com

Abstrack—The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of participatory planning in rural development in Talo District, Seluma Regency. By using quantitative research methods, the effectiveness of participatory planning implementation was analyzed in six dimensions, namely the focus on community interests, the participatory dimension, the synergy dimension, the feasibility dimension, the dynamic dimension, and the legality dimension. From the results of the study it can be concluded that the implementation of participatory planning carried out in Talo District, Seluma Regency is quite effective when viewed from the dimensions of focus on community interests, participatory dimensions, dynamic dimensions and legality dimensions, whereas when viewed from the dimensions of synergy and feasibility the implementation of participatory planning is less effective. If seen as a whole the dimensions of the implementation of participatory planning are quite effective.

Keywords— Effectiveness of participatory planning, focus on community interests, participatory, dynamic, synergy, legality, feasibility

1. PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada penyelenggaraan pembangunan, tahap yang paling awal dan merupakan tahap yang paling vital adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses (Arif, 2006).

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, dengan artian pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan agar masyarakat dapat berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan. Karena masyarakat lokal yang mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Tanggung jawab masyarakat desa dalam pelaksanaan proses pembangunan adalah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan sehingga proses perencanaan pembangunan yang diawali dengan musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) dapat menghasilkan suatu proses perencanaan yang benar-benar dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat.

Perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dalam masyarakat desa. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu dari serangkaian pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maka akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya dan masyarakat kota pada umumnya.

Desa memiliki posisi yang strategis dari sisi pembangunan dan sisi politik. Bila dilihat dari sisi penduduk, desa merupakan basis mayoritas penduduk, atau sebagian besar penduduk menetap di desa. Kondisi demikian akan memungkinkan desa menjadi penyedia tenaga kerja terbesar dan di sisi politik menjadi basis massa yang kerap dimobilisasi demi kepentingan politik. Dari sisi sumberdaya alam, desa merupakan penunjang utama sumber bahan makanan penduduk perkotaan. Dengan demikian maka sudah selayaknya perencanaan pembangunan di desa merupakan sebuah hasil proses musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh. Sehingga pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menyusun perencanaan pembangunan partisipatif diperlukan ketersediaan informasi dana transfer dari pusat ke daerah dan informasi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pusat/provinsi di daerah membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan prioritas dan sinergi program, kegiatan, dan alokasi pendanaan yang biasanya disampaikan melalui Musrenbang. Rendahnya efektifitas perencanaan pembangunan secara partisipatif di kabupaten seluma dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya dalam pelaksanaan musrenbangdes di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa peserta musrenbang belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam meningkatkan pembangunan pedesaan.

Sebagian besar Masyarakat pedesaan di wilayah tersebut dinilai kurang aktif dalam menyampaikan pendapat sehingga dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menyampaikan aspirasinya. Masyarakat Seluma juga kurang antusias dengan penyelenggaraan Musrenbang. Rendahnya antusias masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang menjadi indikator bahwa penyelenggaraan Musrenbang sebagai bagian dari perencanaan partisipatif belum cukup bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ditangkap dan perubahan paradigma perencanaan seperti yang disajikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah ingin mengungkapkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif dalam pembangunan pedesaan berbasis digital di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif atau biasa dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006). Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Perencanaan Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun (Bahua, 2007). Menurut Abe (2005) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Pembangunan Desa

Desa memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pembangunan, sebab desa merupakan struktur pemerintah terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Segala jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara

pada pembangunan desa. Dengan semangat desentralisasi masyarakat harus diberikan ruang untuk ambil bagian dalam skema perencanaan

Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2010) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi. desa. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006: 18-20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*).
2. Sasaran Pembangunan Pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan ketrampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan kelembagaan.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Perencanaan Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun (Bahua, 2007). Menurut Abe (2005) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Efektifitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Efektivitas mengandung pengertian yang beragam, tergantung dari konteks yang digunakan. Menurut Drukcker (1978:44) efektifitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu system dengan keluaran yang diharapkan. Efektifitas berkaitan dengan pekerjaan untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Barnard (dalam Gibson 1997) mendefinisikan efektifitas sebagai pencapaian sasaran dari upaya bersama dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektifitas. Efektifitas juga dapat didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah (Tyson dan Tony, 1992:230). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari responden dilokasi penelitian dalam bentuk pengisian kuisioner. Jenis data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk cross section data.

Penarikan sampel yang cukup tepat dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan teknik *judgement sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai "*information rich*". Indikator yang digunakan sebagai sampel adalah mereka yang terlibat dalam program pembangunan partisipatif diantaranya yaitu kepala desa, ketua BPD, KSM (kelompok swadaya masyarakat), dan Fasilitator serta masyarakat yang lingkungannya dilaksanakan pembangunan fisik. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Talo adalah 14 desa dengan jumlah desa yang diambil untuk penelitian sebanyak 3 desa yaitu desa Serambi Gunung, Kampai dan Bunut tinggi.. Dengan mempertimbangkan tenaga, waktu dan biaya jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 30 orang dengan rincian responden sebagai berikut : Kepala Desa sebanyak 3 orang, BKD sebanyak 3 orang, KSM sebanyak 3 orang dan masyarakat yang desanya dilakukan pembangunan fisik sebanyak 21 orang.

Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dengan bantuan kuesioner terhadap beberapa responden. Wawancara adalah percakapan dengan informan yang diteliti. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data obyek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan dengan menggunakan kuesioner.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang berhubungan dengan angka, bobot, nilai, jumlah dari suatu topik/bahasan. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menilai kinerja pembangunan jalan kampung dan menilai pemberdayaan masyarakat. Untuk mengukur fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93) dalam analisis kuantitatif penulis menggunakan tehnik analisis pembobotan yang dinilai dalam skala linkert yang terdiri dari 5 jenjang mulai yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Pada skala ini pengukuran nilai menggunakan angka 1 sampai dengan 5. Nilai rata-rata tiap indikator didapat dari rumus berikut :

Nilai rata-rata = Nilai Skor Total Indikator / Jumlah responden

Untuk menetapkan nilai rata-rata tiap indikator dilakukan pengelompokan nilai rata-rata sebagai berikut:

- a. nilai 1 - 2,33 : tidak efektif
- b. nilai 2,34 - 3,66 : cukup efektif
- c. nilai 3,67 - 5 : efektif

Pengukuran skala linkert dapat juga menilai apakah pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dengan menggunakan pengukuran nilai antara 1 sampai dengan 5 dapat dikelompokkan nilai sebagai berikut:

- a. nilai 1 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat kurang baik
- b. nilai 2 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan kurang baik
- c. nilai 3 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan cukup baik
- d. nilai 4 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan baik
- e. nilai 5 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat baik

Definisi konsep tentang variable penelitian itu, dioperasionalkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Perencanaan Partisipatif	<p>Terfokus pada kepentingan masyarakat</p> <p>Partisipatoris (keterlibatan)</p> <p>Dinamis</p> <p>Sinergitas</p> <p>Legalitas</p>	<p>1. Masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat</p> <p>2. Memperhatikan aspirasi masyarakat</p> <p>3. Motivasi dan peran-serta kelompok</p> <p>4. Rasa-memiliki pada kelompok</p> <p>5. Peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara</p> <p>6. Berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif</p> <p>7. Menjamin keterlibatan semua pihak</p> <p>8. Kerja sama antar wilayah administrasi</p> <p>9. Memperhatikan interaksi diantara <i>stakeholders</i></p> <p>10. Kepentingan-kepentingan strategis daerah</p> <p>11. mengacu pada semua peraturan yang berlaku</p> <p>12. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat</p>	Ordinal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kepada konsep dan teori yang telah dikemukakan, keefektifan perencanaan partisipatif ditetapkan dalam enam dimensi sebagai berikut : 1. Fokus pada kepentingan masyarakat, 2. Partisipatoris 3. Dinamis 4. Sinergitas Legalitas 6. Fisibilitas, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas perencanaan partisipatif di Kecamatan Talo dengan berbagai dimensi dan indikator dapat dilihat dari pernyataan responden yang mengungkapkan penilaian terhadap seluruh indikator.

1. Fokus Pada Kepentingan Masyarakat

Perencanaan partisipatif dilihat dari dimensi fokus kepada kepentingan masyarakat diukur dengan 4 indikator yaitu : 1). Perencanaan memperhatikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat 2). Perencanaan partisipatif memperhatikan aspirasi masyarakat 3). Perencanaan memperhatikan motivasi dan peran-serta kelompok 4). Perencanaan partisipatif memperhatikan rasa memiliki pada kelompok. Untuk mengukur keempat indikator di atas digunakan skala linkert yang didapat dari nilai enam pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Berdasarkan hasil pengelolaan jawaban pertanyaan diatas, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan bahwa dimensi fokus perencanaan partisipatif pada kepentingan masyarakat masih terlaksana dengan cukup baik 31,67% sedangkan yang

memberi tanggapan tidak cukup baik sebesar 30,56%, memberikan tanggapan yang sangat baik 4,44%, memberikan tanggapan yang sangat kurang baik sebesar 18,89%.

2. Partisipatoris

Jika dilihat dari dimensi partisipatoris pelaksanaan perencanaan partisipatif diukur dari nilai rata-rata pertanyaan yang diberi pembobotan berdasarkan jawaban yang dipilih oleh responden. Untuk mengukur indikator partisipatoris digunakan satu pertanyaan mengenai pemberian sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun.

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang ada dapat dilihat terlihat bahwa mayoritas responden sebanyak 11 orang (36,67%) memberikan tanggapan bahwa dimensi partisipatoris dalam proses pelaksanaan Perencanaan Partisipatif berjalan baik, 30% memberikan tanggapan berjalan cukup baik, 6,67% mengatakan berjalan dengan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perencanaan partisipatif dalam hal sumbangan pikiran dan gagasan sudah berjalan dengan baik.

3. Dinamis

Pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi dinamis diukur dengan satu indikator yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan adanya proaktif masyarakat. Dari indikator yang ada digunakan dua pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan tersebut.

Dari dua pertanyaan yang diajukan kepada responden rata-rata responden menjawab bahwa dimensi dinamis dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat kurang baik sebesar 43,33%, hal ini menunjukkan pelaksanaan perencanaan partisipatif sangat kurang baik dalam meningkatkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, juga mengindikasikan pembangunan yang dilakukan tidak berjalan secara berkelanjutan. Sebanyak 18,33% responden menganggap dimensi dinamis dengan sangat baik, 8,33% memberikan tanggapan dimensi dinamis berjalan dengan baik, 11,67% responden menjawab dimensi dinamis dalam perencanaan partisipatif berjalan cukup baik sedangkan 18,33% menjawab dimensi dinamis berjalan dengan kurang baik dalam perencanaan partisipatif.

4. Sinergitas

Jika dilihat dari dimensi sinergitas, pelaksanaan perencanaan partisipatif diukur dengan empat faktor yaitu : 1). Penjaminan keterlibatan semua pihak dalam perencanaan partisipatif 2). Kerjasama antar wilayah administrasi 3). Interaksi antar stakeholders daerah dan 4). Perhatian terhadap kepentingan-kepentingan strategis daerah.

Dilihat secara keseluruhan dari 30 responden, 44,17% memberikan tanggapan bahwa dimensi sinergitas pelaksanaan perencanaan partisipatif kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat diakibatkan oleh kurangnya kerjasama antar daerah administratif dalam pelaksanaan tersebut. Sebanyak 7,5% responden menjawab dimensi sinergitas berjalan dengan sangat baik, 10% menjawab dimensi sinergitas berjalan dengan baik, dan 11,67% responden menjawab dimensi sinergitas berjalan cukup baik dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif. Sedangkan sisanya sebesar 26,67% responden menjawab dimensi sinergitas berjalan sangat kurang baik dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif.

5. Legalitas

Untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam dimensi legalitas digunakan tiga indikator yaitu : 1). Pelaksanaan perencanaan partisipatif mengacu pada semua peraturan yang berlaku 2). Menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat dan 3). Tidak memberikan peluang dalam penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Sebesar 41,11% responden menganggap pelaksanaan perencanaan partisipatif jika dilihat dari dimensi legalitas berjalan cukup baik, 8,89% menganggap perencanaan partisipatif berjalan dengan sangat baik, 13,33% menjawab bahwa perencanaan partisipatif jika dilihat dari dimensi legalitas berjalan dengan baik, 21,11% responden menjawab dari dimensi legalitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan tidak baik

sedangkan sisanya sebesar 15,56% responden menganggap pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan sangat tidak baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut jika dilihat dari dimensi legalitas cukup berjalan dengan baik juga mengindikasikan masyarakat sudah dapat menilai apakah kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

6. Fisibilitas

Untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam dimensi fisibilitas digunakan satu indikator dengan dua pertanyaan yang diajukan kepada responden, yaitu 1). Spesifikasi pelaksanaan perencanaan partisipatif 2). Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif.

Dilihat pelaksanaan perencanaan partisipatif jika dilihat dari dimensi fisibilitas dapat dijelaskan sebagai berikut, sebagian besar responden yaitu sebanyak 48,33% menganggap pelaksanaan perencanaan partisipatif kurang berjalan baik dari dimensi fisibilitas, sebanyak 5% responden menganggap pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan sangat baik, 13,33% responden menganggap pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan baik, 6,67% responden menjawab perencanaan partisipatif berjalan dengan cukup baik sedangkan sisanya sebesar 26,67% responden menganggap pelaksanaan perencanaan berjalan dengan sangat tidak baik.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa dari enam dimensi yang ada hanya terdapat dua dimensi yang dianggap kurang efektif dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, yaitu dimensi sinergitas dan dimensi fisibilitas. Menurut teori yang ada hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan persepsi, kesukaran dalam memilih model pembangunan yang tepat, batasan waktu dan persoalan praktis. Hal ini dapat dimaknakan bahwa pada desa tempat pelaksanaan perencanaan partisipatif perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah programkan dengan apa yang benar-benar di butuhkan masyarakat pedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang dilakukan didesanya. Hal yang dapat dilihat dari kondisi yang ada kemungkinan kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru, sehingga pemerintah pun menjadi bingung pula dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.

Nilai rata-rata yang didapat dari keseluruhan dimensi adalah 2,55 sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif cukup efektif. Terdapat empat dimensi yang mendukung kondisi ini yaitu fokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis dan dimensi legalitas. Sedangkan dua dimensi yang ada tidak mendukung keefektifan pelaksanaan perencanaan partisipatif, dua dimensi yang tidak mendukung efektifitas perencanaan partisipatif tersebut adalah dimensi sinergitas dan dimensi fisibilitas. Tingkat efektifitas perencanaan partisipatif dapat ditingkatkan dari dimensi sinergitas jika perencanaan partisipatif tersebut lebih memperhatikan faktor interaksi antar *stakeholders* yang ada di daerah tersebut, sehingga kepentingan semua pihak dalam perencanaan partisipatif dapat terakomodasi dengan baik. Sedangkan pada dimensi fisibilitas, efektifitas perencanaan partisipatif dapat ditingkatkan dengan jalan lebih memperhatikan aspek kelayakan spesifikasi dan waktu pengerjaan pelaksanaan perencanaan partisipatif yang berhubungan dengan tingkat keahlian dan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Sehingga secara teori pelaksanaan perencanaan partisipatif tidak efektif karena tidak dapat memenuhi enam syarat yang ada tetapi dalam keadaan sesungguhnya pelaksanaan perencanaan partisipatif dapat dikatakan cukup efektif jika dilihat dari nilai rata-rata enam dimensi yang ada.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, dari penelitian terdahulu didapat adanya hubungan yang erat dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program pembangunan, jadi ada hubungan yang erat antara partisipasi masyarakat dan perilaku birokrat, partisipasi masyarakat dengan program P3KT dan

partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Terpadu. Dari hasil penelitian yang ditampilkan pada Tabel 4.20 didapat dimensi partisipatoris mempunyai nilai rata-rata yang paling besar diantara nilai kelima dimensi yang ada. Jadi dapat dikatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat mempengaruhi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Jika dilihat dari dimensi fokus pada kepentingan masyarakat, indikator yang memiliki peranan terbesar dalam mendukung efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif adalah indikator kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut cukup memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat pada daerah tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki pengaruh terbesar mengurangi efektifitas pada dimensi fokus pada kepentingan masyarakat adalah indikator rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Hal ini berhubungan dengan kepedulian masyarakat untuk memelihara hasil dari pembangunan perencanaan partisipatif tersebut.

Hasil penelitian pelaksanaan perencanaan partisipatif dilihat dari dimensi partisipatoris adalah cukup efektif. Dalam dimensi ini hanya digunakan satu indikator untuk mengukur tingkat efektifitas perencanaan partisipatif yaitu kesempatan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif. Hasil yang didapat mengindikasikan perencanaan partisipatif memperhatikan kepentingan masyarakat misalnya dalam forum pertemuan, masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Sedangkan jika dilihat dari dimensi dinamis didapat hasil bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif cukup efektif. Dari dua indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan pelaksanaan perencanaan partisipatif, indikator pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan memiliki pengaruh terbesar dalam dimensi dinamis. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan perencanaan partisipatif memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak serta proses perencanaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Satu indikator lainnya dalam dimensi dinamis juga menunjukkan pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan cukup efektif tetapi memiliki nilai dibawah indikator pelaksanaan secara berkelanjutan, indikator tersebut adalah proaktif masyarakat. Sehingga jika dilihat dari proaktif masyarakat berarti pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut memperhatikan dan juga membutuhkan proaktif masyarakat agar pelaksanaannya menjadi lancar dan sesuai dengan tujuan yang disepakati sebelumnya.

Dari dimensi sinergitas didapat hasil bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif kurang efektif. Untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi sinergitas digunakan empat indikator, dari empat indikator yang ada terdapat dua indikator yang mendukung bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif cukup efektif yaitu indikator kerjasama antar wilayah administrasi dan indikator kepentingan-kepentingan strategis daerah. Dari dua indikator ini indikator kerjasama antar wilayah administrasi memiliki nilai rata-rata tertinggi mendukung efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan interaksi antar wilayah administrasi dan geografi yang memberikan pengaruh positif kepada kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat diakibatkan oleh meningkatnya kelancaran transportasi sehingga adanya perluasan daerah untuk memasarkan hasil produksi. Sedangkan dua indikator lain yaitu indikator keterlibatan semua pihak dan indikator interaksi antar *stakeholders* tidak mendukung efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif. Hal ini mengindikasikan tidak semua pihak dilibatkan atau diuntungkan oleh pelaksanaan perencanaan partisipatif ini misalnya pihak-pihak yang lahannya terganggu atau dikorbankan dalam pembangunan jalan-jalan produksi yang dilakukan. Sedangkan dari indikator interaksi antar *stakeholders* didapat hasil yang sama dengan indikator sebelumnya yaitu tidak efektif. Hal ini dapat mengindikasikan adanya efek dari indikator sebelumnya yaitu tidak semua pihak dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut sehingga kepentingan-kepentingan para *stakeholders* tidak tercakup dalam pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut.

Dimensi berikutnya adalah dimensi legalitas. Jika dilihat dari dimensi ini maka pelaksanaan perencanaan partisipatif cukup efektif. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam dimensi ini yaitu penerapan peraturan, indikator etika atau nilai dalam masyarakat dan indikator penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dari tiga indikator yang ada indikator penerapan peraturan memiliki nilai rata-rata yang tertinggi, hal ini mengindikasikan pelaksanaan perencanaan partisipatif yang dilakukan memperhatikan penerapan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah indikator penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, walaupun memiliki nilai rata-rata terendah tetapi pelaksanaan perencanaan partisipatif jika dilihat dari indikator ini masih masuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini mengindikasikan walaupun aturan-aturan yang ada diterapkan tetapi tidak dapat menghilangkan semua penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan walaupun hal tersebut dapat ditekan dan dikurangi.

Dari dimensi yang terakhir yaitu dimensi fisibilitas didapat hasil pelaksanaan perencanaan partisipatif tidak efektif. Untuk mengukur tingkat efektifitas perencanaan partisipatif dari dimensi fisibilitas digunakan dua indikator yaitu indikator spesifikasi dan ukuran dan indikator waktu pelaksanaan perencanaan partisipatif. Dari dua indikator yang ada seluruhnya tidak mendukung efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif. Indikator spesifikasi dan ukuran memiliki nilai rata-rata terendah dalam dimensi fisibilitas, hal ini mengindikasikan adanya perbedaan antara hasil dari pelaksanaan pembangunan perencanaan partisipatif dengan yang diharapkan oleh masyarakat pada saat perencanaan partisipatif tersebut direncanakan sehingga berakibat pada indikator yang kedua yaitu waktu yang digunakan untuk pembangunan melebihi waktu yang diperkirakan pada saat perencanaan pembangunan partisipatif tersebut dirumuskan. Hal ini dapat diakibatkan oleh kualitas SDM yang masih rendah sehingga tidak mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang ditetapkan oleh para fasilitator pembangunan, dapat juga disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh yang termasuk indikator dalam dimensi legalitas di atas.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap efektifitas program perencanaan partisipatif di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan berikut hasil dari tanggapan para responden dengan pilihan jawaban yang terbanyak dari setiap dimensi yang ada :
 - a. Untuk dimensi fokus pada kepentingan masyarakat para responden menjawab pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang cukup baik.
 - b. Dari dimensi partisipatoris pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang baik.
 - c. Dari dimensi dinamis pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang sangat kurang baik.
 - d. Dari dimensi sinergitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang kurang baik.
 - e. Dari dimensi legalitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang cukup baik.
 - f. Dari dimensi fisibilitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang kurang baik.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan apabila pelaksanaan perencanaan partisipatif dilihat dari enam dimensi yang ada 31,48% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan kurang baik.
3. Berdasarkan hasil penelitian jika dilihat dari nilai rata-rata pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan cukup efektif jika dilihat dari empat dimensi yang ada yaitu dimensi fokus pada kepentingan masyarakat, dimensi partisipatoris, dimensi dinamis dan dimensi legalitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata empat dimensi tersebut berada antara 2,34 – 3,66.

4. Sedangkan jika pelaksanaan perencanaan partisipatif dilihat dari dimensi sinergitas dan fisibilitas maka pelaksanaan tersebut kurang efektif dikarenakan nilai rata-rata kedua dimensi tersebut yang berada diantara nilai 1,00 – 2,33. Dapat dikatakan bahwa perencanaan partisipatif yang dilakukan di Kabupaten Seluma cukup efektif jika dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi fokus pada kepentingan masyarakat, dimensi partisipatoris, dimensi dinamis dan dimensi legalitas. Sedangkan jika dilihat dari dua dimensi yang lain yaitu dimensi sinergitas dan fisibilitas dapat disimpulkan perencanaan partisipatif berjalan kurang efektif.
5. Berdasarkan dari nilai rata-rata yang didapat dari enam dimensi yang ada dapat disimpulkan pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan cukup efektif, dengan nilai rata-rata sebesar 2,55 yang berada pada kisaran angka 2,34 – 3,66
6. Strategi meningkatkan efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan partisipatif yang dilakukan.
 - b. meningkatkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif.
 - c. melibatkan semua pihak dan memperhatikan interaksi antara parastakeholder yang ada.
7. perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan lebih spesifik dan terukur dengan menggunakan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adisasmitha, Rahardjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arif, Syaiful. 2006, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Malang: Averroes Press.
- Ahmadi, Abu. 2003, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2006, *Bengkulu Dalam Angka*, Bengkulu.
- Bahua, M. Ikbal, 2007, *Metode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat*, <http://eeqbal.blogspot.com/2007/12/metode-perencanaan-partisipatif-dalam.html>
- Drucker, Peter, F. 1978. *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*. Jakarta: Gramedia
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 1990. *Organisasi; Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- <http://www.home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING.doc>
- Jones, Charles O. 1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, (terj.), Jakarta: Rajawali Press.
- Ndraha, T. 1990, *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Seluma, 2007, *Statistik Perekonomian Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Solihin, 2006, *Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Workshop Nasional PP No 39/2006
- Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- UU. Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU.Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU.Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah

Tyson, Shaun dan Jackson, Tony. 1992. *Perilaku Organisasi*. Terjemahan Dedy Jacobus
dan Dwi Prabantini. Jakarta: Andil

